

UPAYA MELANJUTKAN MOMENTUM POSITIF PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN NASIONAL MELALUI KEBIJAKAN SISI PERMINTAAN

Sahat Aditua Fandhitya Silalahi

Abstrak

Indonesia memperoleh momentum positif pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II tahun 2021 sebesar 7,07% di tengah upaya pemulihan akibat pandemi Covid-19. Pertanyaan yang mengemuka adalah bagaimana kebijakan yang tepat untuk memanfaatkan momentum tersebut. Tulisan ini memberikan analisis dan usulan kebijakan yang fokus pada kebijakan sisi permintaan. Kebijakan sisi permintaan dapat menjadi pilihan karena bersifat jangka pendek dan berdampak langsung kepada masyarakat. Kebijakan pemerintah harus fokus pada perbaikan tiga komponen kebijakan sisi permintaan, yaitu peningkatan konsumsi rumah tangga, penguatan ekspor, dan peningkatan investasi di mana kebijakan pada ketiga komponen ini harus saling bersinergi dan tidak tumpang tindih. Diperlukan peran DPR, khususnya Komisi VI, VII, dan XI dalam melakukan pengawasan melalui mekanisme rapat kerja dengan kementerian terkait agar kebijakan sisi permintaan dapat terimplementasi dengan baik.

Pendahuluan

Perekonomian Indonesia pada Triwulan II/2021 mencatat pertumbuhan positif (7,07%) untuk pertama kali sejak pandemi Covid-19 dibandingkan Triwulan II/2020 sebesar minus 5,03%. Kinerja triwulan tersebut berhasil melanjutkan tren positif yang telah terjadi sejak awal tahun 2021. Pertumbuhan pada rentang waktu tersebut juga mencatatkan sejarah tertinggi sejak Triwulan IV/2004 (7,16% *year-on-year*). Indikator dari kinerja perekonomian salah satunya ditunjukkan dari meningkatnya nilai

Produk Domestik Bruto (PDB) yang telah melampaui nilai PDB riil pada Triwulan IV/2019, yaitu rentang waktu sebelum terjadinya pandemi Covid-19 (Bank Indonesia, 5 Agustus 2021).

Bank Indonesia melaporkan bahwa kinerja positif terutama ditopang oleh komponen permintaan masyarakat yang dapat terus terjaga seiring dengan kombinasi kebijakan pengetatan dan pelonggaran kegiatan sosial yang merupakan strategi pemerintah sejak awal meluasnya pandemi (Bisnis Indonesia, 5 Agustus 2021). Selain itu komponen penciptaan lapangan kerja dan lapangan usaha



juga menjadi kontributor signifikan dari perbaikan ekonomi (Bisnis Indonesia, 5 Agustus 2021). Di sisi lain, komponen penciptaan lapangan kerja dapat meningkat seiring dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang perlahan mulai bergerak kembali.

Bila melihat lebih detail pada sisi permintaan, perbaikan ekonomi pada Triwulan II 2021 terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga, peningkatan kinerja ekspor, dan investasi. Pada Triwulan II/2021 kinerja ekspor mencatat pertumbuhan sebesar 31,78 % (*year-on-year*) (Bank Indonesia, 5 Agustus, 2021). Peningkatan ekspor terutama didorong oleh permintaan dari negara mitra yang telah mengalami perbaikan seiring dengan meredanya pandemi Covid-19 (Bisnis Indonesia, 6 Agustus 2021). Konsumsi rumah tangga untuk pertama kalinya juga mencatat pertumbuhan positif sejak Triwulan II/2020 sebesar 5,93% (*year-on-year*), meningkat dibandingkan kinerja Triwulan I/ 2021. Peningkatan tersebut didukung dengan perbaikan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk dampak stimulus dari pemerintah berupa kebijakan relaksasi dari Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) yang mampu mendorong pembelanjaan masyarakat (Bank Indonesia, 5 Agustus 2021). Sementara itu, pemerintah juga terus memberikan angin segar bagi pertumbuhan investasi di Indonesia, salah satunya dengan kebijakan terpusat dan memudahkan bagi investor melalui Kementerian Investasi yang telah terbentuk. Salah satu indikator keberhasilannya adalah pertumbuhan investasi sebesar 8.06% pada Triwulan II/2021 (*year-on-year*) (Media Indonesia, 30 Agustus 2021). Tulisan ini akan membahas kebijakan

sisi permintaan yang dapat diambil pemerintah pada aspek: (1) konsumsi rumah tangga; (2) peningkatan kinerja ekspor; dan (3) peningkatan investasi.

Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Permintaan

Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi tercermin dari total pendapatan nasional suatu negara dalam kurun waktu tertentu di mana permintaan secara agregat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai kinerja pertumbuhan. Khusus bagi negara yang masih bergantung kepada penerimaan pajak seperti Indonesia, maka kebijakan sisi permintaan akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Nanga, 2005: 32). Melihat momentum pertumbuhan ekonomi di tengah pemulihan akibat pandemi Covid-19, maka diperlukan kebijakan pemerintah secara komprehensif di sisi permintaan agar mampu menjaga dan mengakselerasi perbaikan perekonomian ini.

Mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif dan stabil merupakan tujuan utama dari penyelenggaraan kebijakan negara di bidang ekonomi dalam jangka panjang (Tohap, 2010: 74). Kebijakan yang berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat melalui jalur peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Menurut Nanga (2005: 41), pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dikatakan berhasil bila pendapatan nasional secara agregat meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa mesin ekonomi sudah bekerja secara efektif di dalam sistem pelaku ekonomi di sebuah negara, mulai dari pemerintah, pengusaha, hingga lapisan masyarakat

terbawah.

Unsur pembentuk dari agregat permintaan tersebut adalah gabungan dari komponen sektor riil, yaitu: (1) konsumsi masyarakat; (2) investasi; (3) ekspor dan impor; dan (4) pengeluaran pemerintah (Nanga, 2005, 13). Namun pada prakteknya komponen pengeluaran pemerintah sering diabaikan dalam perhitungan mengingat dampaknya yang hanya terbatas, misalnya kenaikan gaji atau pemberian gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk menstimulus pembelanjaan oleh ASN (Ndari, 2012: 10). Dampak pembelanjaan pemerintah pun masih dipertanyakan pada masa pemulihan akibat pandemi Covid-19, karena kemungkinan golongan tersebut sengaja menahan pembelanjaan mengingat situasi perekonomian yang tidak memberikan kepastian. Dengan alasan inilah maka komponen pengeluaran pemerintah dikeluarkan dari objek pembahasan pada tulisan ini.

Kebijakan sisi permintaan, walaupun dapat menstimulus permintaan dalam jangka pendek, namun memiliki kelemahan utama, yaitu mendorong kenaikan inflasi akibat permintaan yang berlebih tanpa disertai peningkatan kapasitas produksi yang memadai (Robert, 2009). Bahkan efektivitasnya masih sering dipertanyakan dalam kondisi krisis ekonomi yang berkepanjangan tanpa kepastian kapan krisis akan berakhir (Alan, 2010). Seringkali walaupun pemerintah sudah memberikan banyak stimulus namun pembelanjaan masyarakat tidak juga mencapai hasil yang diharapkan.

Di sisi lain kebijakan sisi penawaran memiliki dampak yang lebih tidak berisiko, khususnya dalam

menekan laju inflasi. Kebijakan sisi penawaran menekankan pentingnya memperkuat kapasitas produksi dan sumber daya manusia pelaku ekonomi sehingga mampu memperbaiki fundamental perekonomian suatu negara (Stefan, 2011). Peningkatan kapasitas produksi dalam kebijakan sisi penawaran bertujuan untuk mengimbangi potensi peningkatan permintaan sebagai akibat dari kebijakan sisi permintaan yang cenderung akan meningkatkan inflasi (Rober, 2009). Namun demikian, pendapat yang mengemuka adalah pada saat terjadinya krisis di mana pemerintah membutuhkan kebijakan yang bersifat jangka pendek dan segera menstimulus pertumbuhan ekonomi, maka kebijakan sisi permintaan akan lebih efektif untuk dilakukan (Teweldebrehan, 2010). Oleh karena itu kebijakan sisi permintaan akan lebih tepat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek pada masa pemulihan akibat pandemi Covid-19 ini.

Alternatif Kebijakan Pemerintah

Pengeluaran rumah tangga didefinisikan sebagai pengeluaran rumah tangga keluarga maupun perseorangan serta lembaga swasta bukan perusahaan yang digunakan untuk membeli barang dan jasa langsung yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Gulcin, 2004: 729). Indikator pengeluaran rumah tangga merupakan indikator yang bersifat langsung mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, karena menunjukkan kegiatan konsumsi di masyarakat lapisan terbawah (Dian dan Khusaini, 2018: 140).

Pemerintah sejak awal pandemi Covid-19 telah mengimplementasikan

kebijakan pembatasan mobilitas sosial secara fleksibel sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19 yang ditandai dengan tingkat *positivity rate*. Kebijakan ini pada dasarnya mencoba menyeimbangkan tingkat pendapatan, konsumsi masyarakat, dan aspek kesehatan yang tentunya menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan ekonomi. Pemerintah tentu menyadari bahwa pembatasan sosial secara ketat akan membawa dampak terhadap pendapatan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah mengombinasikan kebijakan ini dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi golongan yang terdampak. Salah satu sumber alokasi dari BLT adalah Dana Desa, di mana realokasi anggaran ditujukan untuk menjaga tingkat daya beli dan kesejahteraan masyarakat desa di tengah pandemi Covid-19.

Seiring dengan momentum perbaikan ekonomi, alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah adalah dengan mempertahankan kebijakan pemberian BLT disertai dengan pemberian insentif bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang terdampak pandemi Covid-19. Kebijakan insentif dapat berupa keringanan pajak, bantuan modal, atau bantuan pemasaran yang tentunya dapat meningkatkan volume penjualan. Pemerintah perlu melakukan pendataan UKM yang benar-benar secara signifikan mengangkat konsumsi rumah tangga. Indikator yang dapat digunakan antara lain adalah jumlah tenaga kerja yang terserap, volume penjualan, dan pangsa pasar yang dimiliki.

Alternatif lain dalam mendorong konsumsi (permintaan) adalah dengan program padat karya tunai melalui Dana Desa dari APBN di desa-desa yang telah diimplementasikan

sejak awal tahun 2018 sampai 2021. Program ini relatif berhasil karena bersifat swakelola, mempekerjakan banyak warga desa dan dengan upah (*cash*) bersifat mingguan. Artinya, naiknya pendapatan masyarakat di desa-desa akan menaikkan konsumsi (permintaan) terhadap barang kebutuhan terutama kebutuhan pokok.

Dari aspek peningkatan ekspor, pada Triwulan I/2021 Indonesia sudah mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar USD5,83 miliar per akhir Mei 2021 (*Bisnis Indonesia*, 15 Juni 2021). Hal ini didorong terutama oleh kenaikan volume dan nilai ekspor komoditas non-migas yang didukung oleh perbaikan ekonomi negara-negara mitra dagang. Fakta ini tentu merupakan indikator positif dari kinerja ekspor yang mampu melepaskan ketergantungan kepada ekspor migas yang berkurang akibat pembatasan mobilisasi secara massal.

Dalam memelihara momentum pertumbuhan ekspor tentunya adalah memberikan kemudahan bagi para eksportir nasional, khususnya yang menasar negara-negara mitra dagang dengan kebutuhan komoditas non-migas. Salah satu strategi adalah mempercepat pembentukan peraturan turunan dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan bagi produk berorientasi ekspor.

Dari sektor investasi, tercatat investasi yang masuk ke Indonesia pada Kuartal II/2021 sebesar Rp223 triliun. Investasi ini terdiri atas 47,6% investasi dalam negeri dan 52,4% investasi luar negeri (*beritasatu.com*, 1 September 2021). Hal ini menunjukkan naiknya tingkat kepercayaan investor, khususnya investor asing terhadap kinerja

perbaikan ekonomi nasional pada saat pandemi Covid-19. Pemerintah harus memanfaatkan momentum meningkatnya kepercayaan investor dengan melanjutkan upaya penyederhanaan perijinan sebagaimana diatur dalam UU Ciptaker, sehingga aliran modal baik dari dalam maupun luar negeri dapat terus meningkat. Sementara itu Kementerian Investasi selanjutnya memperkuat peraturan penanaman modal dengan fokus utama mengarahkan aliran modal kepada sektor riil yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Penutup

Indonesia telah memperoleh momentum perbaikan ekonomi di tengah upaya pemulihan pandemi Covid-19. Penulis menyarankan agar pemerintah fokus pada kebijakan sisi permintaan yang bersifat jangka pendek dan memiliki dampak langsung. Alternatif kebijakan harus diarahkan kepada tiga komponen utama pembentuk permintaan masyarakat, yaitu konsumsi rumah tangga, ekspor, dan investasi. Tujuan utama adalah mendorong kontribusi positif dari ketiga komponen tersebut sehingga secara agregat dapat mendukung pertumbuhan dan pemulihan ekonomi secara nasional. Dewan Perwakilan Rakyat RI, khususnya Komisi VI, VII, dan XI dapat mengambil peran pengawasan melalui rapat kerja, sehingga kebijakan pemerintah dapat saling bersinergi, tidak tumpang tindih, dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Referensi

Auerbach, Alan. (2010). "Measuring the Output Responses to Fiscal Policy". *NBER Working Paper* No. 16311.

"BNC Jadikan Tahun ini Investasi Transformasi Digital", *Media Indonesia*, 30 Agustus 2021, hal. 12.

B. Stefan. (2011). "A St. Louis Equation to Reasses the Influence of Macroeconomic Policy Instrument". *Munich Personal RePec Archive Paper*. No. 28771.

Departemen Komunikasi Bank Indonesia, "Ekonomi Indonesia Melanjutkan Perbaikan, Tumbuh Positif pada Triwulan II 2021", 5 Agustus 2021.

"Ekspor Indonesia Mei 2021 Naik Pesat 58,3 Persen, Ini Pemicunya!", *Bisnis Indonesia*, 15 Juni 2021, hal.1.

"Fokus Pasar: Investasi Asing di Indonesia Meningkat", <https://www.beritasatu.com/ekonomi/806401/fokus-pasar-investasi-asing-di-indonesia-meningkat>, diakses 1 September 2021.

H. Robert. (2009). "By How Much Does GDP Rise if the Government Buys More Output?". *NBER Working Paper* No. 15496.

"Menko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Positif 7 Persen Sesuai Prediksi", *Kompas*, 5 Agustus 2021, hal. 3.

Nanga, Muana. (2005). *Makro Ekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

"Pemulihan Ekonomi Mitra Dagang Pacu Ekspor Impor Indonesia", *Bisnis Indonesia*, 6 Agustus 2021, hal. 5.

"Positif, BPS: Ekonomi Indonesia Tumbuh 7.07 Persen Kuartal II/2021", *Bisnis Indonesia*, 5 Agustus 2021, hal. 5.

- Parulian, Tohap. (2010). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan Error Correction Model". *Jurnal Keuangan dan Bisnis*. Vol. 2 No. 2, hal. 72-88.
- S. Ndari. (2012). "Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Output dan Inflasi". *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Edisi 4 (April), hal. 9-12.
- S.B., Dian dan M. Khusaini. (2018). "Pengaruh Krisis Ekonomi terhadap Fungsi Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia: Penerapan *Absolute Income Hypotheses*". *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, hal. 137-144.
- T. Gulcin. (2014). "An Analysis of Household Consumption Expenditure". *Journal of European Scientific*. Vol. 11 No. 2, hal. 727-733.
- T. Teweldebrehan. (2010). "Relative Effectiveness of Monetary and Fiscal Policies on Economic Growth in Ethiopia: Vector Autoregression Approach". *Unpublished Thesis*.



Sahat Aditua Fandhitya Silalahi
sahat.silalahi@dpr.go.id.

Sahat Aditua F Silalahi, ST, MBA, menyelesaikan pendidikan S-1 di Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung pada Tahun 2004. Kemudian memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari Universitas Gadjah Mada pada Tahun 2009. Selama bekerja di Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI, aktif bertugas dalam Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan RUU tentang Perindustrian, serta Panitia Khusus Angket DPR RI tentang Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II). Beberapa tulisan yang pernah dipublikasikan antara lain : *Factors Affecting Satisfaction and Loyalty Toward Islamic Banking* (Atlantis Press, Web of Science Indexed, 2019) , *Isu Strategis pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara* (2016), dan *Permasalahan Pada Industri Manufaktur di Indonesia* (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.